

KOMPOSISI DEWAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Gabrielle Dika Duryat, Totok Dewayanto ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the composition of the board and institutional ownership on disclosure of corporate social responsibility. This study uses capital structure and firm size as a control variable.

The population in this study consists of manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange for the period 2015 - 2017. Sample determined with purposive sampling method. Total sample of this research is 210 companies.

This study used multiple regression analysis for hypotheses testing. The results of this study show that board size and institutional ownership has positive effect and significant on corporate social responsibility disclosure. This study also show that independence board commissioner has negative effect and significant on corporate social responsibility disclosure. Meanwhile, board education has no effect on corporate social responsibility disclosure.

Keywords: Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Disclosure, Board Composition, Ownership Structure.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, topik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah menarik perhatian para peneliti dan praktisi di seluruh dunia. Banyak dari mereka yang dengan kuat berpendapat bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan keberhasilan ekonomi dan kinerja keuangan mereka karena mereka juga diharapkan untuk berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Gagasan bahwa perusahaan pencari laba harus memperluas cakupan tujuan dan sasarannya di luar memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya adalah apa yang menjadikan CSR ada. Ini berarti perusahaan perlu menyeimbangkan tujuan keuangan dan non keuangan mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi masyarakat di sekitar mereka, lingkungan alam, karyawan dan pelanggan mereka. CSR hampir menjadi salah satu praktik bisnis standar di zaman kita. Perusahaan telah mengakui pengaruh tekanan sosial pada aktivitas dan operasi mereka dan menerima bahwa mereka telah menjadi lebih bertanggung jawab kepada khalayak yang lebih luas daripada hanya kepada para pemangku kepentingan dan tunduk pada pengawasan ketat dari publik daripada hanya pemegang saham dan kreditor mereka (Abu Qa'dan & Suwaidan, 2019). Oleh karena itu, pelaporan tentang kegiatan CSR semakin penting bagi bisnis untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap isu-isu lingkungan dan sosial (C. A. Adams, 2004; Brammer & Pavelin, 2008). Ini mengharuskan perusahaan menyajikan informasi yang mencakup kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan mereka (Cormier *et al.*, 2011; Deegan, 2004).

Regulasi antara Indonesia dan negara-negara lain mengenai CSR memiliki keanekaragaman yang beragam. Di Indonesia, yang disahkan oleh DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di Indonesia. Keempat ayat dalam pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan

¹ Corresponding author

lingkungan. Substansi dalam ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (4) tentang Perseroan Terbatas, 2007 mengandung makna, mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan kewajiban melaporkannya.

Namun, di Indonesia masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan CSR sebab kurangnya faktor ketegasan dari dalam maupun luar perusahaan. Pelaksanaan CSR di Indonesia yang masih belum banyak ini ternyata menimbulkan potensi sasaran CSR sebagai *negative externality* yang sangat besar bagi perusahaan (Harahap, 2004), seperti kerusakan lingkungan, pengangguran, putus sekolah dan kemiskinan. Jika perusahaan memasukkan aktivitas CSR kedalam rencana kerjanya, diharapkan *negative externality* tersebut dapat berkurang. Sejalan dengan hal tersebut (Utama, 2007) menyatakan bahwa perkembangan CSR terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari polusi udara, air dan perubahan iklim.

Belum adanya standar baku di Indonesia yang mengatur tentang pelaporan aktivitas sosial perusahaan menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda mengenai pengungkapan sosial sesuai dengan karakteristik perusahaan dan sebagian besar studi yang telah dilakukan di negara maju di mana pengaruh komposisi dewan dan struktur kepemilikan (sebagai mekanisme tata kelola perusahaan internal dan eksternal) pada pengungkapan CSR mungkin berbeda dari yang ada di negara berkembang. Hal-hal tersebut yang telah membuat peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai komposisi dewan (ukuran dewan, dewan komisaris independen dan latar belakang pendidikan dewan komisaris) dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan didalam konteks dunia bisnis di Indonesia.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh komposisi dewan dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan memahami karakteristik pelaporan pada CSR dapat dianggap sebagai fungsi pemantauan dengan tujuan mengurangi konflik yang terjadi diantara dewan komisaris, pemegang saham dan manajemen.

Penelitian ini menunjukkan sejauh mana perusahaan-perusahaan yang terdaftar di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, mengambil peran sosial mereka secara serius. Kemudian, sebagai *research gap*, studi ini menambah literatur yang ada tentang dampak potensial komposisi dewan dan kepemilikan institusional pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan variabel baru yang belum pernah diuji sebelumnya menggunakan data Indonesia, yaitu latar belakang pendidikan dewan komisaris. Penelitian ini diantisipasi untuk memberikan umpan balik kepada regulator Indonesia dan BEI tentang kecukupan peraturan saat ini mengenai persyaratan pengungkapan sukarela perusahaan di Indonesia.

Penelitian dimulai dengan tinjauan literatur tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, komposisi dewan dan kepemilikan institusional. Selanjutnya, kerangka penelitian berdasarkan teori agensi dikembangkan, perumusan hipotesis dijabarkan, penulisan metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian dan pembahasannya, kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya di masa depan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

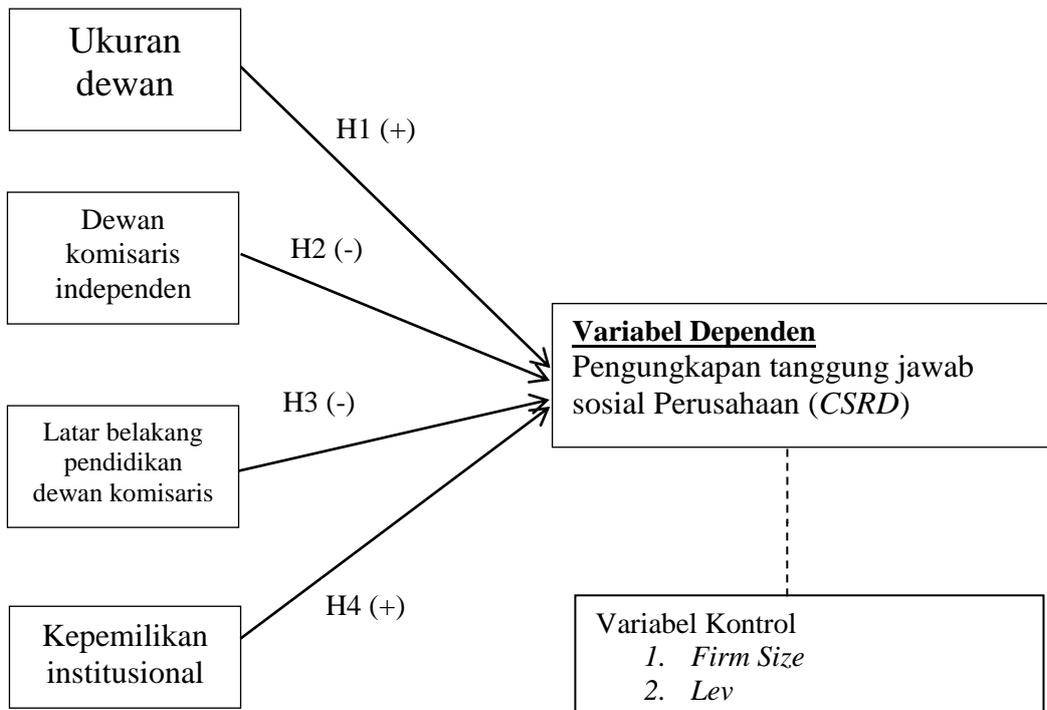
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan informasi kepada publik mengenai kegiatan perusahaan dengan masyarakat, lingkungan, karyawannya, penggunaan konsumen dan energi di perusahaan. Pengungkapan sosial perusahaan dikategorikan sebagai pengungkapan sukarela karena tidak diperlukan oleh rezim pengungkapan keuangan, standar akuntansi, peraturan dan regulasi bursa, dan Hukum Perusahaan di Indonesia. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan sosialnya, sebagaimana dinyatakan dalam laporan tahunan atau laporan sosial terpisah (David & Markus,

1996). Pengungkapan sosial perusahaan mencakup rincian lingkungan fisik, energi, sumber daya manusia, produk dan masalah keterlibatan masyarakat.

Menurut teori agensi, meningkatkan pengungkapan perusahaan dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer, yang lebih cenderung memiliki pengetahuan rinci tentang kegiatan operasional perusahaan, memberikan informasi tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi kepada para pemegang saham dan kelompok pengguna lainnya (Cooke, 1989). Informasi lain yang diungkapkan dianggap sukarela karena peraturan pelaporan keuangan umumnya mengajukan persyaratan pengungkapan minimum. Pengungkapan sukarela adalah kebijaksanaan manajer, dan sebagaimana dikemukakan oleh Verrecchia (1983), manajer akan mengungkapkan informasi sukarela ketika manfaat lebih besar daripada biaya terkait.

Penelitian ini memeriksa pengaruh komposisi dewan dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Komposisi dewan dalam penelitian ini dijelaskan oleh 3 variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu ukuran dewan, dewan komisaris independen dan latar belakang pendidikan dewan komisaris. Kepemilikan institusional digunakan sebagai proksi dari struktur kepemilikan. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 1 menggambarkan pengaruh variabel-variabel independen maupun kontrol terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan, dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris dan kepemilikan institusional.

Garis lurus yang tergambar di Gambar 1 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan garis putus-putus yang tergambar di atas memiliki arti bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel dependen dengan variabel kontrol. Variabel kontrol yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *firm size* dan *lev*.

Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ukuran dewan

Dewan komisaris merupakan komponen penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang mengawasi pelaksanaan bisnis dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik oleh para agen (manajer). Ukuran dewan mungkin memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan, termasuk pengungkapan *CSR*. Dari perspektif teori agensi, dapat dikatakan bahwa dewan yang lebih besar lebih mungkin untuk mendeteksi masalah keagenan, hanya karena dewan tersebut menawarkan keahlian yang lebih besar, pengawasan manajemen dan akses ke sumber daya yang lebih luas. Dewan yang lebih besar dipandang sebagai sesuatu yang lebih diinginkan, karena mereka dapat memberikan perusahaan dengan lebih banyak cara untuk terhubung dengan pemangku kepentingan eksternal yang mengontrol sumber daya yang diperlukan untuk operasi perusahaan (Chang, 2010). Selain itu, dewan yang lebih besar lebih mungkin memiliki keragaman yang lebih besar dalam pendidikan dan pengalaman daripada dewan yang lebih kecil (R. B. Adams *et al.*, 2005). Namun, ukuran dewan komisaris yang sangat besar akan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *CSR* karena dapat membatasi komunikasi dan koordinasi di antara anggota dewan dan akibatnya akan menghambat proses pemantauan (Veronica Siregar & Bachtiar, 2010).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/Pojk.04/2014, dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Bukti empiris yang dilaporkan oleh Said *et al.* (2009), Veronica Siregar & Bachtiar (2010) dan Abu Qa'dan & Suwaidan (2019) menunjukkan bahwa dewan yang lebih besar cenderung dikaitkan dengan tingkat pengungkapan *CSR* yang lebih besar. Dengan demikian, hipotesis berikut disarankan:

H1. Ukuran Dewan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)

Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan dewan komisaris independen

Menurut teori agensi, dewan komisaris independen lebih berhati-hati dan akan lebih memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan saat membuat keputusan dewan (Chen & Roberts, 2010). Komisaris independen termotivasi untuk meningkatkan pengungkapan informasi kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan citra perusahaan dan untuk mengurangi asimetri informasi (Fama & Jensen, 1983; Lim *et al.*, 2007). Oleh karena itu, mereka cenderung mendorong praktik dan pengungkapan *CSR*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/Pojk.04/2014, dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen. Dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Penelitian Zhang *et al.* (2013), Khan *et al.* (2013), Kuzey *et al.* (2015) dan Deschênes *et al.* (2015) menemukan adanya hubungan positif antara persentase komisaris independen di dewan dan tingkat pengungkapan *CSR*. Namun, Penelitian Haniffa & Cooke (2005) menunjukkan bahwa pengaruh negatif ditemukan antara dewan komisaris independen dan tingkat pengungkapan *CSR*. Hal ini karena perusahaan dengan dewan komisaris yang didominasi oleh dewan komisaris independen memainkan peran terbatas dalam mempengaruhi kebijakan dan praktik pengungkapan *CSR* dan dalam beberapa situasi, dewan komisaris independen memiliki rasa ketidakpedulian terhadap masalah masyarakat. Studi empiris yang dilakukan oleh Abu Qa'dan & Suwaidan (2019) menemukan adanya hubungan negatif antara persentase komisaris independen di dewan dan tingkat pengungkapan *CSR*. Dengan demikian, hipotesis berikut disarankan:

H2. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)

Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan latar belakang pendidikan dewan komisaris

Menurut teori agensi, keragaman latar belakang pendidikan dianggap menjamin pemantauan dan efektivitas yang lebih baik Allini *et al.* (2016). Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh dewan komisaris berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Ahmed & Nicholls, 1994). Dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola bisnis dan mengambil keputusan (Kusumastuti & Sastra, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Allini *et al.* (2016) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan mempengaruhi pengungkapan sukarela secara negatif. Studi saat ini ingin menunjukkan apakah ada pengaruh dari proporsi latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan menggunakan literatur yang sudah ada, hipotesis berikut disarankan:

H3: Latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional

Investor institusional dapat dilihat sebagai kelompok pemegang saham khusus dengan saham yang relatif lebih besar dan kekuatan voting yang lebih besar (Schnatterly, Shaw, & Jennings, 2008). Pemilik institusional berpengaruh dalam keputusan organisasi dengan menggunakan kekuatan suara yang substansial serta memiliki keunggulan informasi asimetris dibandingkan pemegang saham lainnya (Schnatterly *et al.*, 2008). Meskipun beberapa investor institusional dapat memprioritaskan kepentingan mereka sendiri hanya dengan melihat keuntungan jangka pendek di perusahaan di mana mereka berinvestasi, sebagian besar investor institusional prihatin dengan kinerja jangka panjang yang dapat ditingkatkan dengan praktik manajemen yang baik seperti tindakan CSR. Oleh karena itu, mereka cenderung mendukung inisiatif CSR oleh investee mereka (Mahoney & Roberts, 2007).

Bukti empiris yang dilaporkan oleh banyak penelitian sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh Oh *et al.* (2011) dan Soliman *et al.* (2012), menunjukkan hubungan positif antara kepemilikan institusional dan tingkat pengungkapan CSR. Dengan demikian, hipotesis berikut disarankan:

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dari penelitian ini adalah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan CSR disebut sebagai pengungkapan sukarela oleh perusahaan untuk menyediakan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan gambaran posisi perusahaan dan kegiatan pada dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial (Ranald, 2002). Untuk menilai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, digunakan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Item yang termasuk dalam indeks pengungkapan dipilih setelah peninjauan literatur CSR yang ekstensif dan seksama (Alnaimi *et al.*, 2012; Haniffa & Cooke, 2005; Kuzey *et al.*, 2015; Spiller, 2011). Selain itu, dua inisiatif global mengenai praktik dan pengungkapan CSR telah ditinjau. Yang pertama adalah *Global Reporting Initiative (GRI)* - Standar Pelaporan Keberlanjutan (versi G4) yang diterbitkan oleh Badan Standar Keberlanjutan Global. Standar GRI mewakili efek operasi mereka pada ekonomi, lingkungan dan masyarakat secara sukarela (GRI Standards, 2017). Inisiatif kedua adalah Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO) 26000 - Panduan tentang Tanggung Jawab Sosial yang dikeluarkan oleh ISO.

Standar ini terdiri dari: hak asasi manusia, praktik tenaga kerja, lingkungan, praktik operasi yang adil, masalah konsumen serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat (International Organization for Standardization (2010) . Selanjutnya, persyaratan pelaporan hukum dan peraturan untuk perusahaan publik juga dipertimbangkan selama pembangunan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Langkah-langkah yang disebutkan di atas menghasilkan indeks pengungkapan CSR yang mencakup 42 item informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Item diklasifikasikan menjadi empat kategori: informasi lingkungan, informasi sumber daya manusia, informasi keterlibatan masyarakat dan informasi produk / layanan pelanggan. Item pengungkapan CSR yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
Item Pengungkapan CSR

Lingkungan	
LKG1	Pernyataan kebijakan lingkungan
LKG2	Tujuan dan target lingkungan
LKG3	Pertimbangan lingkungan umum (kebisingan, udara, air, kualitas visual)
LKG4	Audit lingkungan (Referensi untuk tinjauan lingkungan, pelingkupan, audit, penilaian termasuk pengesahan independen)
LKG5	Kebijakan investasi lingkungan
LKG6	Pertimbangan lingkungan dalam kebijakan peminjaman
LKG7	Sensitivitas lingkungan dalam proses (limbah, pengemasan, daur ulang, pengembangan produk dan produk)
LKG8	Keberlanjutan (Penyebutan keberlanjutan atau pembangunan berkelanjutan)
LKG9	Estetika lingkungan (merancang fasilitas yang selaras dengan lingkungan, lansekap, kontribusi dalam bentuk uang tunai atau seni / patung, perkebunan pohon, dll.)
LKG10	Pelatihan lingkungan
LKG11	Sertifikasi lingkungan (ISO 14001 vs)
LKG12	Proyek-proyek bersama dengan perusahaan lain yang menyediakan layanan manajemen lingkungan
LKG13	Penghargaan lingkungan
Sumber Daya Manusia	
SDM1	Kesehatan dan keselamatan karyawan
SDM2	Pekerjaan minoritas
SDM3	Mempekerjakan orang-orang cacat
SDM4	Pelatihan karyawan
SDM5	Bantuan dan tunjangan karyawan
SDM6	Remunerasi karyawan
SDM7	Profil karyawan
SDM8	Moral karyawan
SDM9	Hubungan dengan serikat pekerja profesional
SDM10	Perbaikan kondisi kerja umum
SDM11	Informasi tentang pergantian karyawan
SDM12	Informasi tentang dukungan untuk penitipan anak, cuti hamil dan paternitas
Keterlibatan Masyarakat	
KM1	Sumbangan untuk kegiatan komunitas dan badan amal
KM2	Pekerjaan siswa
KM3	Dukungan untuk pendidikan
KM4	Mendanai program atau kegiatan beasiswa
KM5	Mensponsori konferensi, seminar, atau pameran

KM6	Mensponsori proyek olahraga atau rekreasi
KM7	Dukungan untuk seni dan sains
KM8	Mendukung kegiatan swadaya masyarakat
KM9	Mensponsori proyek kesehatan masyarakat
KM10	Mendukung kampanye kebanggaan nasional / yang disponsori pemerintah
KM11	Mendukung pengembangan atau industri lokal atau program dan kegiatan komunitas

Produk / Layanan Pelanggan

PLP1	Penjelasan tentang berbagai jenis produk / layanan
PLP2	Pengembangan layanan dan penelitian
PLP3	Kualitas layanan
PLP4	Keluhan / umpan balik / kepuasan pelanggan
PLP5	Penghargaan konsumen
PLP6	Penyisihan untuk pelanggan cacat dan lanjut usia

Setiap laporan tahunan diperiksa secara ekstensif untuk menentukan ada atau tidaknya item pengungkapan. Prosedur dikotomis digunakan dalam menghitung nilai pengungkapan *CSR* untuk setiap laporan tahunan / perusahaan. Dengan demikian, jika perusahaan mengungkapkan item, maka akan menerima skor 1; jika tidak, maka akan menerima skor 0. Hal ini menghasilkan skor pengungkapan untuk setiap laporan tahunan / perusahaan yang dihitung dengan membagi jumlah sebenarnya item yang diungkapkan oleh laporan tahunan / perusahaan dengan jumlah total item yang termasuk dalam indeks pengungkapan *CSR*. Oleh karena itu, nilai pengungkapan *CSR* untuk setiap laporan tahunan / perusahaan dinyatakan sebagai persentase yang berkisar dari 0 persen jika perusahaan tidak mengungkapkan item apa pun hingga 100 persen jika perusahaan mengungkapkan semua item dalam indeks. Nilai pengungkapan tanggung jawab *CSR* untuk setiap laporan tahunan di setiap tahun dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai pengungkapan } CSR_{i,t} = \frac{\sum_1^{42} d_{i,t}}{42}$$

dimana:

d = adalah 1 jika item i diungkapkan dan 0 sebaliknya; dan

t = merepresentasikan waktu (tahun).

Jadi, 0 persen \leq pengungkapan tanggung jawab *CSR* \leq 100 persen.

Perlu disebutkan bahwa item dalam indeks pengungkapan *CSR* tidak ditimbang. Alasan untuk ini adalah untuk menghilangkan bias yang melekat dalam skor tertimbang (Chow & Wong-Boren, 1987). Pendekatan item yang tidak diberi bobot telah menjadi norma dalam penelitian pengungkapan karena mengurangi subjektivitas (Ahmed, 1999).

Variabel independen pada penelitian ini adalah ukuran dewan, dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris dan kepemilikan institusional. Jumlah komisaris di dewan digunakan untuk mengukur ukuran dewan. Persentase komisaris independen pada jumlah total komisaris di dewan digunakan untuk mengukur dewan komisaris independen. Proporsi jumlah dewan komisaris dengan gelar akuntansi / keuangan pada ukuran dewan digunakan untuk mengukur latar belakang pendidikan dewan komisaris. Persentase saham yang beredar dipegang oleh pemegang saham institusional digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional.

Variabel kontrol penelitian ini terdiri atas *firm size* dan *lev*. *Firm size* diukur menggunakan rumus $Size = \text{Logarithm natural (Ln) of Total Assets}$ pada akhir tahun. Total hutang dibagi total aset digunakan untuk mengukur *lev*.

Populasi dan Sampel

Populasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2017. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai populasi data karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang diharapkan paling banyak melakukan kegiatan CSR.

Teknik purposive sampling dipilih sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu mengambil sampel berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria untuk pemilihan sampel penelitian ini disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Kriteria sampel penelitian

No	Keterangan
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017.
2.	Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang telah diaudit pada Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada 2015-2017.
3.	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah. Hal ini demi menghindari hasil data yang tidak akurat karena fluktuasi dari mata uang asing.
4.	Perusahaan yang menyediakan data yang dibutuhkan peneliti untuk mengukur variabel dependen dan variabel independen yang ditetapkan pada penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan (annual report) perusahaan. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari laporan tahunan perusahaan yang dapat diakses melalui Bursa Efek Indonesia (idx.co.id) dan bloomberg terminal..

Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CSR_{Dit} = \beta_0 + \beta_1 BS_{it} + \beta_2 IBC_{it} + \beta_3 BEDU_{it} + \beta_4 IO_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

CSR_{Dit}	= Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
β_0	= Intersep
$\beta_{(1-4)}$	= Koefisien variabel
e	= <i>Error</i> term
i	= Mewakili observasi (laporan tahunan)
t	= Mewakili waktu (tahun)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Indonesia, yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Sampel penelitian merupakan perusahaan – perusahaan didalam objek penelitian yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Rincian objek dan sampel penelitian dijelaskan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3
Objek Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017	440
2	Perusahaan manufaktur yang memiliki data informasi yang kurang lengkap	(203)
3	Perusahaan manufaktur yang <i>delisting</i> dan pindah sektor pada tahun 2015-2017	(6)
4	Jumlah perusahaan manufaktur yang layak dijadikan sampel selama 3 tahun (2015-2017)	210

Tabel 3 menunjukkan dari total 440 objek penelitian, total sampel yang dapat digunakan dalam penelitian hanya 210 sampel.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran (deskripsi) atas data penelitian yang dapat menunjukkan nilai maksimum, minimum, standar deviasi, dan mean. Statistik deskriptif atas penelitian ini disajikan pada tabel 4.

Tabel 4
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>CSRINDEX</i>	210	0.095	0.714	0.36168	0.156956
<i>BFSIZE</i>	210	2	9	4.21	1.805
<i>IBC</i>	210	0.167	0.600	0.40385	0.078899
<i>BEDU</i>	210	0.000	0.667	0.22222	0.217913
<i>IO</i>	210	0.051	0.998	0.75944	0.198037
<i>Size</i>	210	25.620	33.162	28.70926	1.688845
<i>LEV</i>	210	0.085	1.321	0.43558	0.192222
Valid N (listwise)	210				

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah 2019

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Dari seluruh uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.200 untuk masing-masing model regresi. Hal tersebut menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal dikarenakan nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0.05.
- Uji multikolonieritas menunjukkan nilai toleransi seluruh variabel lebih besar dari 0.10 dan memiliki nilai VIF dibawah 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen dan kontrol di dalam model regresi.
- Uji heteroskedasitas dengan grafik *scatterplot* menunjukkan persebaran titik-titik pada grafik yang tidak menunjukkan pola tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk penelitian.
- Uji autokorelasi dengan uji *Durbin Watson* menunjukkan nilai *d* sebesar 1.937 untuk masing-masing model. Nilai tersebut menunjukkan tidak ada autokorelasi pada model regresi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian menggunakan uji regresi berganda dengan asumsi *ordinary least square*. Hasil uji yang telah dilakukan ditampilkan pada tabel 5.

Tabel 5
Regresi

	Variabael	Prediksi Arah Koef.	Nilai Koef	P-value	Arah Koef	Status Signifikansi	Status Hipotesis
H1	Ukuran Dewan	(+)	0.025	0.000	(+)	Signifikan	Didukung
H2	Dewan Komisaris Independen	(-)	-0.335	0.003	(-)	Signifikan	Didukung
H3	Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris	(-)	-0.005	0.907	(-)	Tidak Signifikan	Ditolak
H4	Kepemilikan Institusional	(+)	0.100	0.025	(+)	Signifikan	Didukung

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah 2019

Berdasarkan tabel di atas, apabila nilai probabilitas menunjukkan angka kurang dari 0.05 maka hasil uji regresi dapat dikatakan mendukung hipotesis penelitan. Hasil uji statistik *f* menunjukkan nilai *p-value* masing-masing sebesar 0.000 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam model regresi dalam menggambarkan variabel dependennya. Hasil uji koefisien determinasi pada uji regresi yang menunjukkan nilai *adjusted R square* masing-masing model

regresi sebesar 0.400 yang menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 40%.

Interprestasi Hasil

Hipotesis 1

Pengaruh ukuran dewan terhadap tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur di Indonesia diuji melalui pengujian hipotesis pertama. Hasil dari pengujian menunjukan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0.000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 dan koefisien beta sebesar 0.025 sehingga hipotesis pertama diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh positif antara ukuran dewan komisaris dan tingkat pengungkapan CSR.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara ukuran dewan dan pengungkapan CSR. Artinya, semakin besar jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan menandakan semakin tingginya tingkat pengungkapan CSR yang dihasilkan. Dari perspektif teori agensi, jumlah dewan komisaris yang lebih besar akan lebih mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi karena ada lebih banyak orang untuk melaksanakan pekerjaan. Menambahkan lebih banyak anggota ke dewan komisaris memberikan informasi dan sumber daya yang berpotensi memiliki manfaat. Jadi, dewan yang lebih besar secara langsung meningkatkan daya saing perusahaan dan meningkatkan lingkungan perusahaan atas keterbukaan informasi dan pengungkapan yang lebih luas. Selain itu, dapat dikatakan bahwa jumlah dewan yang lebih besar akan lebih besar kemungkinannya untuk mendeteksi masalah keagenan, karena dewan tersebut menawarkan keahlian yang lebih besar, pengawasan ke manajemen dan akses ke sumber daya yang lebih luas.

Hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua digunakan untuk menguji pengaruh yang negatif antara dewan komisaris independen dan tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil dari pengujian menunjukan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0.003 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 dan koefisien beta sebesar -0.335 sehingga hipotesis kedua diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dan tingkat pengungkapan CSR.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara persentase dewan komisaris independen dan tingkat pengungkapan CSR. Artinya, semakin besar jumlah anggota komisaris independen dalam perusahaan menandakan semakin rendahnya tingkat pengungkapan CSR yang dihasilkan.

Hipotesis 3

Pengujian hipotesis ketiga digunakan untuk menguji pengaruh negatif antara latar belakang pendidikan dewan komisaris dan tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil dari pengujian menunjukan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0.907 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 dan koefisien beta sebesar -0.005 sehingga hipotesis ketiga ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara latar belakang pendidikan dewan komisaris dan pengungkapan CSR. Artinya, semakin banyak atau semakin sedikit dewan komisaris dengan latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR yang dihasilkan oleh perusahaan.

Hipotesis 4

Pengujian hipotesis keempat digunakan untuk menguji pengaruh yang positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan *CSR* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil dari pengujian menunjukkan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0.025 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 dan koefisien beta sebesar 0.100 sehingga hipotesis keempat diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan *CSR*.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan *CSR*. Artinya, semakin besar persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan menandakan semakin tingginya tingkat pengungkapan *CSR* yang dihasilkan

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Pada dasarnya penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis komposisi dewan dan kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) yang diukur menggunakan *CSRINDEX* yang mencakup 42 item informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Penelitian ini mempunyai 4 variabel independen yaitu ukuran dewan, dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris dan kepemilikan institusional.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda (*Ordinary Least Square*), dengan populasi yaitu perusahaan manufaktur dari berbagai sektor yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan 210 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 dan sesuai dengan kriteria sampel yang ditetapkan peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) dengan arah positif. Perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan komisaris yang semakin banyak didalam perusahaan akan membuat semakin tingginya tingkat pengungkapan *CSR* yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) dengan arah negatif. Perusahaan yang memiliki jumlah anggota komisaris independen yang semakin banyak didalam perusahaan akan membuat semakin rendahnya tingkat pengungkapan *CSR* yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kepemilikan saham oleh institusi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) dengan arah positif. Perusahaan dengan persentase kepemilikan saham oleh institusi yang semakin banyak didalam perusahaan akan membuat semakin tingginya tingkat pengungkapan *CSR* yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Keterbatasan

Keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini sebagai berikut:

1. Data yang diambil pada saat penelitian adalah data dari tahun 2015-2017, hal ini disebabkan karena pada saat penelitian ini dibuat, laporan tahun 2018 belum terbit.
2. Jumlah sampel hanya ada 210 dari total 440 perusahaan manufaktur, hal ini dikarenakan adanya perusahaan yang menerbitkan laporan tidak sesuai dengan kriteria dalam penelitian.

3. Perusahaan yang ada dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Penelitian ini hanya berfokus pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang diukur menggunakan indeks CSR yang memiliki 42 item CSR sehingga masih banyak item CSR lainnya yang belum digunakan oleh peneliti.

Saran

Untuk perkembangan penelitian selanjutnya maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel perusahaan dari berbagai sektor industri yang ada di Indonesia.
2. Dikarenakan peneliti saat ini mengadopsi indeks CSR yang telah dimodifikasi sesuai penelitian terdahulu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan indeks CSR lainnya yang dapat ditemukan pada *Global Reporting Initiative (GRI)* - Standar Pelaporan Keberlanjutan (versi *G4*) yang diterbitkan oleh Badan Standar Keberlanjutan Global.
3. Dari aspek karakteristik dewan komisaris, penelitian selanjutnya dapat menggunakan jenis kelamin, ikatan, kualifikasi akademik dan profesional dari dewan komisaris.
4. Dari aspek struktur kepemilikan, penelitian selanjutnya dapat lebih spesifik mengenai kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan perorangan atau individu.

REFERENSI

- Abu Qa'dan, M. B., & Suwaidan, M. S. (2019). Board composition, ownership structure and corporate social responsibility disclosure: the case of Jordan. *Social Responsibility Journal*, 15(1), 28–46. <https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2017-0225>
- Adams, C. A. (2004). The ethical, social and environmental reporting-performance portrayal gap. In *Accounting, Auditing & Accountability Journal* (Vol. 17). <https://doi.org/10.1108/09513570410567791>
- Adams, R. B., Almeida, H., & Ferreira, D. (2005). Powerful CEOs and their impact on corporate performance. *Review of Financial Studies*, 18(4), 1403–1432. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhi030>
- Ahmed, K. (1999). Associations Between Corporate Characteristics and Disclosure Levels in Annual Reports : *Victoria*, (June 1996), 35–61.
- Ahmed, K., & Nicholls, D. (1994). The impact of non-financial company characteristics on mandatory disclosure compliance in developing countries: The case of Bangladesh. *The International Journal of Accounting*, 29(1), 62–77.
- Allini, A., Rossi, F. M., & Hussainey, K. (2016). *The board's role in risk disclosure: an exploratory study of Italian listed state-owned enterprises*. 0962(December 2015), 954–962. <https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1118935>
- Alnaimi, H. A., Hossain, M., & Momin, M. A. (2012). Corporate social responsibility reporting in Qatar: A descriptive analysis. *Social Responsibility Journal*, 8(4), 511–526. <https://doi.org/10.1108/17471111211272093>
- Brammer, S., & Pavelin, S. (2008). Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure. *Business Strategy and the Environment*, 17(2), 120–136. <https://doi.org/10.1002/bse.506>
- Chang, W. S. (2010). Social Network and Corporate Financial Performance: Conceptual Framework of Board Composition and Corporate Social Responsibility. *Journal of Business and Management*, 5(6), 92–98.
- Chen, J. C., & Roberts, R. W. (2010). Toward a More Coherent Understanding of the

- Organization-Society Relationship: A Theoretical Consideration for Social and Environmental Accounting Research. *Journal of Business Ethics*, 97(4), 651–665. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0531-0>
- Chow, C. W., & Wong-Boren, A. (1987). Voluntary Financial Disclosure by Mexican Corporations. *Accounting Review*, 62(3), 533. <https://doi.org/10.2307/247575>
- Cooke, T. E. (1989). *Voluntary Corporate Disclosure by Swedish Companies*.
- Cormier, D., Ledoux, M. J., & Magnan, M. (2011). The informational contribution of social and environmental disclosures for investors. *Management Decision*, 49(8), 1276–1304. <https://doi.org/10.1108/00251741111163124>
- David, H., & Markus, Jm. (1996). Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(1), 77–108.
- Deegan, C. (2004). Environmental disclosures and share prices - A discussion about efforts to study this relationship. *Accounting Forum*, 28(1), 87–97. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2004.04.007>
- Deschênes, S., Rojas, M., Boubacar, H., Prud'homme, B., & Ouedraogo, A. (2015). The impact of board traits on the social performance of Canadian firms. *Corporate Governance (Bingley)*, 15(3), 293–305. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2014-0097>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. <https://doi.org/10.1086/467037>
- GRI Standards. (2017). GRI standards. *Global Reporting Initiative*, 1–25. <https://doi.org/10.1029/95GL01432>
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001>
- Harahap, S. S. (2004). *Analisis kritis atas laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGarfindo Persada.
- International Organization for Standardization (2010). (2010). *International Organization for Standardization (2010), "ISO 26000 guidance on social responsibility", available at: www.cnis.gov.cn/wzgg/201405/P020140512224950899020.pdf*.
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Business Ethics*, 114(2), 207–223. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>
- Kusumastuti, S., & Sastra, P. (2007). *Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance*. 88–98.
- Kuzey, C., Kiliç, M., & Uyar, A. (2015). The Impact of Ownership and Board Structure on Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting in the Turkish Banking Industry The Relationship between Governance Indicators and Tax Evasion in the EU View project Earnings management View project Merve Kıl. *Corporate Governance International Journal of Business in Society*. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2014-0022>
- Lim, S., Matolcsy, Z., & Chow, D. (2007). The association between board composition and different types of voluntary disclosure. *European Accounting Review*, 16(3), 555–583. <https://doi.org/10.1080/09638180701507155>
- Mahoney, L., & Roberts, R. W. (2007). Corporate social performance, financial performance and institutional ownership in Canadian firms. *Accounting Forum*, 31(3), 233–253. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2007.05.001>
- Oh, W. Y., Chang, Y. K., & Martynov, A. (2011). The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Korea. *Journal of Business Ethics*, 104(2), 283–297. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0912-z>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/Pojk.04/2014. (n.d.). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/Pojk.04/2014. *Ojk.Go.Id*, 1–29. Retrieved from <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>
- Ranald, D. P. (2002). The business case for Sustainable Development: Making a difference towards the Earth Summit 2002 and beyond. *Corporate Environmental Strategy*, 9(3), 226–235. [https://doi.org/10.1016/S1066-7938\(02\)00071-4](https://doi.org/10.1016/S1066-7938(02)00071-4)

- Said, R., Zainuddin, Y., & Haron, H. (2009). The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212–226. <https://doi.org/10.1108/17471110910964496>
- Schnatterly, K., Shaw, K. W., & Jennings, W. W. (2008). INFORMATION ADVANTAGES OF LARGE INSTITUTIONAL OWNERS. *Strategic Management Journal*, 29(1), 219–227. <https://doi.org/10.1002/smj>
- Soliman, M. M., Bahaa-EIDin, M., & Sakr, A. (2012). Ownership Structure and Corporate Social Responsibility (CSR): An Empirical Study of The Listed Companies in Egypt. *International Journal of Social Sciences*, 5(1), 63-.
- Spiller, R. (2011). Ethical Business and Investment: A Model for Business and Society. *Business Challenging Business Ethics: New Instruments for Coping with Diversity in International Business*, 149–160. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4311-0_15
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (4) tentang Perseroan Terbatas. (2007). *Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas*.
- Utama, S. (2007). Pengaruh Persistensi Laba dan Laba Negatif Terhadap Koefisien Respon Laba dan Koefisien Respon Nilai Buku Ekuitas pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Journal of Accounting and Economics*, 10 No.3.
- Veronica Siregar, S., & Bachtiar, Y. (2010). Corporate social reporting: empirical evidence from Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(3), 241–252. <https://doi.org/10.1108/17538391011072435>
- Verrecchia, R. E. (1983). *Robert E. VERRECCHIA*. 5, 179–194.
- Zhang, J. Q., Zhu, H., & Ding, H. bin. (2013). Board Composition and Corporate Social Responsibility: An Empirical Investigation in the Post Sarbanes-Oxley Era. *Journal of Business Ethics*, 114(3), 381–392. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1352-0>